



Bhinneka Tunggal Ika as Unifying Diversity Denominations and Christian Teachers in Indonesia

Vera S. M. Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan

Corresponding Author: Vera S. M. Simanjuntak vera.simanjuntak@sttekumene.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Bhinneka Tunggal Ika, Christian Educators in Indonesia, Interdenominational Plurality

Received : 12, September

Revised : 15, October

Accepted : 20, November

©2024 Simanjuntak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Interracial conflicts usually occur due to unfavorable treatment from one racial group towards other racial groups. Freedom in democracy should not be understood as freedom that is as free as possible but freedom that is responsible. Qualitative research method with an analytical approach in looking at the problems in this paper. The results of this research are that religious leaders and Church denomination leaders should be able to build harmonious and synergistic working relationships with the government in helping to maintain the unity and harmony of religious communities. The emergence of awareness of Indonesia's pluralistic culture also colors the attitudes and behavior of each individual to respect each other's culture in the framework of realizing the motto Bhinneka Tunggal Ika in togetherness. There is no single culture that is more prominent and more important than other cultures in Indonesia. In fact, cultural diversity in Indonesia will complement one another. Indonesian culture will become increasingly recognized by other nations in the world. Freedom in democracy should not be understood as freedom that is as free as possible but freedom that is responsible. For this reason, religious leaders and leaders of church denominations should be able to build harmonious and synergistic working relationships with the government in helping to maintain the unity and harmony of religious communities.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pemersatu Kemajemukan antar Denominasi dan Pengajar Kekristenan di Indonesia

Vera S. M. Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan

Corresponding Author: Vera S. M. Simanjuntak vera.simanjuntak@sttekumene.ac.id

ARTICLE INFO

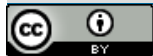
Kata Kunci: Bhinneka Tunggal Ika, Christian Educator in Indonesia, Interdenomination Plurality.

Received : 12, September

Revised : 15, October

Accepted : 20, November

©2024 Simanjuntak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Konflik antarras biasanya terjadi karena adanya perlakuan tidak baik dari salah satu kelompok ras pada kelompok ras lainnya yang berbeda. Kebebasan dalam berdemokrasi hendaknya tidak dipahami sebagai kebebasan yang sebeb-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dalam melihat permasalahan dalam tulisan ini. Adapun hasil penelitian ini agar para pemuka agama dan pimpinan denominasi Gereja hendaknya dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah dalam ikut menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama. Munculnya kesadaran akan budaya Indonesia yang majemuk turut mewarnai sikap dan perilaku setiap individu untuk saling menghormati budaya satu dengan yang lain dalam kerangka mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kebersamaan. Tidak ada satupun budaya yang lebih menonjol dan lebih penting dari budaya lain di Indonesia. Justru kemajemukan budaya di Indonesia akan melengkapi satu dengan yang lainnya budaya di Indonesia menjadi semakin dikenal keberadaannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kebebasan dalam berdemokrasi hendaknya tidak dipahami sebagai kebebasan yang sebeb-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Untuk itu, para pemuka agama dan pimpinan denominasi gereja hendaknya dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah dalam ikut menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang Muncul dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia, a) konflik antargolongan, konflik yang terjadi pada suatu golongan dengan golongan yang lain biasa dipicu dengan perbedaan pandangan atau pendapat. Namun, tak jarang juga konflik antargolongan terjadi karena adanya tindakan kurang menyenangkan dari suatu golongan. b) Konflik antaragama biasanya terjadi saat adanya perbedaan pandangan. Selain itu ada juga pemicu konflik antaragama yang lain, yaitu pemaksaan pandangan dari suatu agama pada pemeluk agama yang berbeda. c) konflik antarsuku, biasanya konflik ini terjadi pada suatu suku dengan suku yang lainnya. Konflik antarsuku biasanya dipicu dengan adanya perbedaan kebiasaan, adat, aturan, hingga perebutan wilayah. d) konflik antarras, sesuai dengan namanya, konflik ini terjadi pada suatu kelompok ras dengan kelompok ras lainnya.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia, Burung Garuda Pancasila. Pada kaki Burung Garuda itulah terpampang dengan jelas tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional, hal tersebut telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.” Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memuat dua konsep yang berbeda, bahkan kedua konsep tersebut seolah-olah bersifat kontradiktif. Kedua konsep itu adalah “Bhinneka” dan “Tunggal Ika”. Konsep “Bhinneka” mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan konsep “Tunggal Ika” menginginkan adanya kesatuan (Mahkamah Konstitusi RI. 2006). Keanekaan dicirikan oleh adanya perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan. Jika kedua hal tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan tekanan yang berbeda (tidak seimbang), maka akan dapat menimbulkan kondisi yang berbeda pula. Manakala segi keanekaan yang menonjolkan unsur perbedaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka kemungkinan munculnya konflik tak terhindarkan.

Sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu ditampilkan secara berlebihan, maka tindakan itu tergolong melanggar kodrat perbedaan, karena perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan. Adanya dua konsep yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” mengandung problem metafisika, yaitu problem antara kepelbagaian dan kesatuan, problem antara hal banyak (*the many*) dan hal satu (*the one*). Berdasarkan problema tersebut tampak bahwa untuk mencari makna “Bhinneka Tunggal Ika” diperlukan adanya perenungan mendalam yang bersifat filosofis metafisis (Pursika, 2009).

Umat Kristen Indonesia adalah bagian dari keluarga besar Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua hal ini menjadi pemersatu antar warga negara. Karenanya, pemuka agama dan pimpinan denominasi gereja juga harus menjadi bagian pemersatu umat bukan sebaliknya. Kebebasan dalam berdemokrasi hendaknya tidak dipahami sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Untuk itu, para pemuka agama dan pimpinan denominasi gereja hendaknya dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah dalam ikut menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam adat, budaya, suku, agama, dan ras dapat terikat menjadi kesatuan, yang didasari oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa kesatuan yang dimunculkan dari semboyan tersebut, dapat memperkuat bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang dapat menjadi permasalahan dalam pemahaman Bhinneka Tunggal Ika adalah tingginya sentimen kedaerahan yang masih sering muncul di tengah masyarakat (Agus, 2021). Penyelenggaraan PAK di masa kini menghadapi tantangan yang cukup berat menyangkut berbagai perkembangan yang ada yang dapat mempengaruhi kehidupan iman dan spiritualitas anak-anak Kristen Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi

berbagai permasalahan yang kompleks, seperti konflik yang seringkali diikuti dengan kekerasan, bahaya perpecahan atau disintegrasi bangsa, pelanggaran HAM, ketidakadilan sosial, pelecehan terhadap hukum, diskriminasi terhadap masyarakat marjinal, kekerasan kepada perempuan dan anak-anak, reformasi dan demokratisasi yang disinyalir “jalan di tempat”, serta kemiskinan yang semakin membuat terpuruknya kehidupan bangsa ini (Pira, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan studi pustaka melalui buku, artikel, dan jurnal. Melalui metode ini diharapkan dapat memaparkan masalah yang akan diteliti. Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjelaskan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik penelitian yaitu literatur review atau studi pustaka (Hasibuan, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN *Karakter Masyarakat Bhinneka Tunggal Ika Yang Bertanggungjawab*

Memahami Bhinneka Tunggal Ika, berarti lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri. Masyarakat dapat menjaga rasa persatuan di masyarakat, supaya dapat menjaga keamanan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika dapat dijabarkan menjadi 4 karakter, yaitu religious, nasionalisme, mandiri, dan gotong-royong. Bhineka Tunggal Ika itu merupakan unsur pengikat yang dapat melahirkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga dapat menjadi pilar kokohnya NKRI. Keempat karakter tersebut sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan sudah menjadi kearifan lokal yang tumbuh subur di masyarakat (Agus, 2021).

Sebagai negara yang multikultural, keberagaman di Indonesia harus betul betul dijaga dan diharapkan tetap eksis dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Keberagaman masyarakat Indonesia tampak jelas, antara lain

mulai dari perbedaan suku, ras, agama (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Negara yang demikian itu memiliki peluang besar akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab serta tantangan bagi masyarakat khususnya pemerintah dalam usaha untuk mencegah akan terjadinya perpecahan. Perpecahan sering terjadi disebabkan karena adanya perasaan kedaerahan serta kesukuan yang berlebihan (Fanatik), sehingga hanya menganggap bahwa apa yang dianut maka dialah yang paling benar.

Dengan kondisi keberagaman yang ada di Indonesia, membuat Indonesia bergantung terhadap perilaku masyarakat yang dapat menjadikan perbedaan menjadi sebuah kekayaan bangsa atau memandangnya sebagai sebuah pemecah karena ketidaksamaan yang diinginkan (Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia kini dihadapkan dengan adanya berbagai perubahan dan kebebasan dalam kehidupan yang serba berkemajuan. Will Kymlicka memiliki pandangan bahwa “akan sulit berada pada masyarakat yang dilandasi dengan keberagaman yang luas untuk tetap dalam persatuan. Kecuali jikamasyarakat tetap menghargai perbedaan dan ingin hidup di sebuah negeri dengan beragam bentuk keanggotan budaya dan politik”. 2 Sejalan dengan pendapat tersebut, telah banyak peristiwa yang menjadi bukti bagaimana isu SARA memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Ide Bhinneka Tunggal Ika di sini bukanlah prinsip ideologis semata, melainkan berupa penghayatan bersama dalam kebersamaan dan kemajemukan. Kebangsaan bukan cuma sekedar persamaan tumpah darah dan tempat tinggal (Febiyanti et al., 2023). Jauh melampaui itu, kebangsaan adalah soal bagaimana tiap warganya diikat oleh perasaan dan kehendak yang sama untuk maju di tengah keberagaman. Kebangsaan yang diusung Soekarno mengetengahkan prinsip kesatuan dalam kebhinekaan di tengah multikulturalnya bangsa ini. Realitas ini sebenarnya tampak ketika

bencana tsunami melanda Aceh. Saat itu semua warga bangsa (bahkan dunia) tergerak untuk turun tangan dengan berbagai cara. Semua warga, tanpa dikomando, seakan diikat oleh rasa yang sama bahwa yang sedang menderita adalah sesama warga bangsa juga. Semua merasa senasib sepenanggungan membantu dengan caranya masing-masing tanpa memperdulikan unsur SARA. Inilah potret Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya dalam negara yang multikultural ini.

Kebebasan dalam berdemokrasi hendaknya tidak dipahami sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Untuk itu, para pemuka agama dan pimpinan denominasi Gereja hendaknya dapat membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis dengan pemerintah dalam ikut menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama. “Keharmonisan yang dimunculkan hendaknya keharmonisan yang penuh kasih dan mengedepankan kerukunan. Hal ini penting mengingat kerukunan bukanlah situasi yang muncul dengan sendirinya tetapi harus diperjuangkan sebagai suatu tujuan bersama dalam bingkai keagamaan,” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016).

Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pemersatu Kemajemukan Antar Denominasi Dan Pengajar Kekristenan Di Indonesia

Kemajemukan Indonesia sudah diketahui oleh seluruh dunia. Fakta ini sudah melekat sejak berdirinya bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah suku di Indonesia yang tercatat pada tahun 2010 ada sekitar 1340an lebih suku di Indonesia dengan 633 suku besar (BPS, 2020). Sedangkan, dari sisi agama, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97/2016), negara Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Tetapi, masih banyak agama-agama suku yang secara pengikut juga banyak dan masih tetap eksis sekalipun dalam dunia yang maju saat ini. Secara akademis disebut dengan berbagai istilah seperti agama tradisional kepercayaan, agama leluhur, ritual adat, agama

leluhur, kepercayaan lokal dan agama lokal, dan agama primitif. (Sukirmo, dkk., 2016). Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindarkan dari bangsa Indonesia dan seharusnya menjadi kehati-hatian juga untuk meramu perbedaan yang diuraikan di atas. Keberagaman budaya, kearifan lokal, suku, bahasa, agama, dan bahkan adat istiadat menjadi warisan yang perlu dijaga dan disyukuri. Terbentang sekitar 17.760 pulau dan lebih dari 1340 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, serta memiliki sejarah budaya dan agama yang berbeda juga dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki adat istiadat budaya suku yang didapati dari nenek moyang mereka (Setyobekti, 2021).

Kesadaran budaya multikultural diperlukan sehubungan dengan pembentukan persepsi kebhinekaan, di mana anak menghasilkan penerimaan terhadap budaya lain dalam rangka menghargai serta melestarikan budaya dari setiap suku bangsa di Indonesia (Ulfa, 2013). Munculnya kesadaran akan budaya Indonesia yang majemuk turut mewarnai sikap dan perilaku setiap individu untuk saling menghormati budaya satu dengan yang lain dalam kerangka mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kebersamaan. Tidak ada satupun budaya yang lebih menonjol dan lebih penting dari budaya lain di Indonesia. Justru kemajemukan budaya di Indonesia akan melengkapi satu dengan yang lainnya budaya di Indonesia menjadi semakin dikenal keberadaannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Penerimaan antar satu budaya dengan budaya yang lain menimbulkan sikap menghormati dan mencintai budaya tersebut sebagai sebuah kekayaan yang melimpah yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa Indonesia (Setyobekti, 2020).

Masyarakat Indonesia menjadikan adat istiadat sebagai pegangan yang bersifat absolut melebihi kepercayaan kepada Allah. Namun kepercayaan juga membentuk *worldview* dari masyarakat yang mengajarkan untuk mencintai sesama manusia. Salah satu wujudnya dengan membangun hidup bersatu, tenggang rasa, kebersamaan, dan damai sejahtera dalam komunitas sukunya. Sedangkan disisi lain, perbedaan

kepercayaan diantara mereka juga mengandung potensi terjadinya konflik dan perpecahan bangsa. Konflik itu terjadi karena masing-masing suku mempertahankan kepercayaannya dan adat istiadat mereka, sebagai kegiatan yang utama dan absolut kebenarannya. Sering terjadi kesalahpahaman antara ajaran masing-masing suku sehingga menimbulkan perdebatan yang berujung kekerasan. Agama atau kepercayaan suku hingga saat ini tetap menjadi pegangan yang sulit dilepaskan. Semangat kesukuan terkadang mengalahkan semangat nasionalisme (Ulfa, 2013).

Pendidikan Agama Kristen dalam konteks multikultural dikembangkan oleh James A. Banks dengan penelitiannya mengenai *multicultural education*. Banks memulai pendidikan multikultural ini melalui gagasan bahwa semua murid (manusia) harus mengalami kesamaan atau kesederajatan pendidikan di sekolah-sekolah terlepas dari suku, etnis, ras, kelas sosial, agama, jenis kelamin, budaya, bahkan tingkat pengetahuan. Kultur disini tentunya bukan hanya berkaitan dengan budaya namun menyangkut juga dengan segala aspek kehidupan seseorang. Kehadiran PAK dalam masyarakat majemuk adalah implementasi dari teladan orang percaya, yaitu Yesus Kristus. Yesus tetap menghormati budaya dimana diri-Nya dilahirkan, tetapi juga mampu dan berani untuk menembus batas suku, agama, dan budaya (Banks, 2002).

Perubahan pandangan manusia pada masa postmodern, menuntut para guru dan pengajar PAK jebih memperhatikan kebutuhan strategi pembelajaran mengenai materi, pandangan mengenai kesucian dan kekudusan, serta dampak teknologi yang sangat kuat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat (Sugiono, 2014). Banyak orang yang mengalami keguguran iman karena tidak sanggup menghadapi perubahan-perubahan tersebut, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di tempat-tempat pedesaan terpencil. Kehadiran pendidikan agama Kristen sangat penting untuk membentuk akhlak dan moralitas agar masyarakat memiliki perilaku, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang baik. Tantangan perubahan nilai yang dihadapi, yang sangat besar pengaruhnya dalam

kehidupan kita adalah dunia komunikasi, nilai moral dan etika, serta kekerasan sosial (Pantan, dkk 2021). "Banyak sekali orang yang menyalahgunakan alat komunikasi seluler, serta nilai-nilai kekudusan bukan lagi merupakan hal yang prinsip dalam kehidupan mereka, dan juga rasa kasih sayang di antara sesama menjadi kurang sehingga tidak heran banyak sekali kasus sadisme dan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Isi pendidikan agama Kristen yang dapat diterapkan di tengah masyarakat majemuk yaitu sebagai berikut. Pertama, pengajaran iman Kristen. Tentu ini menjadi pembeda dengan pendidikan lainnya. Di sini, PAK bertugas membantu peserta didik dalam pemahaman doktrinal kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada tindakan praktis yang dapat dilakukan. Kedua, pengembangan sniritual: di sini PAK harus membantu peserta didik untuk mengembangkan kerohanian dan sikap serta perbuatan mereka, serta membimbing ke arah kedewasaan rohani (Sirait, dkk 2020). Ketiga, pembebasan yang diarahkan kepada kehidupan bermasyarakat peserta didik dalam menghayati gaya hidup kristiani dengan terlibat langsung di lingkungan masyarakat. Keempat, Relevansi yang diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan iman masa kini dengan segala corak berpikrnya. Hal ini supaya peserta didik dapat mengaplikasikannya secara konsisten meskipun terdapat tantangan dan keadaan tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemajemukan adalah realitas di Indonesia yang mesti dikelola dengan baik supaya dapat memberi dampak positif bagi kemajuan bangsa, dan bukanlah konflik horizontal yang merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu, pendidikan Agama Kristen memiliki andil dalam membentuk sikap toleransi dan kebersamaan dalam perbedaan. Dari pemaparan diatas maka kita bisa mengetahui dan memahami berbagai strategi pendekatan dan pengaturan pendidikan agama Kristen khususnya di tengah-tengah masyarakat indonesia yang majemuk.

Bhinneka Tunggal Ika yang termaktub dalam Pancasila sebagai filsafat dan pandangan hidup

bangsa perlu dipahami dan dikembangkan serta diimplementasikan dalam berinteraksi sosial, karena nilai-nilai yang terkandung dalam ke-Bhinneka Tunggal Ika-an mempunyai fungsi sebagai motivasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan dalam bermasyarakat, dan pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, berfungsi juga untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah, dengan tetap menghormati kepentingan lain, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pemahaman nilai-nilai ke-Bhinneka Tunggal Ika-an harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu dalam bertindak dan membangun serta memelihara tuntutan bangsa yang terintegrasi secara nasional demi keutuhan NKRI yang dikenal dengan masyarakat multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Budi Setyobekti, dkk., (2020). Implementasi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia di DKI Jakarta. *SOTIRIA (Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani)*, Vol. 4 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>
- Andreas Budi Setyobekti, Susanna Kathryn, and Suwondho Sumen, “Implementasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Membingkai Keberagaman Pejabat Gereja Bethel Indonesia Di DKI Jakarta,” *SOTIRIA (Jurnal Theologia Dan Pendidikan Agama Kristen)* 4, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.47166/sot.v4i1.29>.
- Frans Pantan et al., “Resiliensi Spiritual Menghadapi Disruption Religious Value Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Keagamaan,” *KURIOS (Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen)* 7, no. 2 (2021).
- I Nyoman Pursika. (2009). KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN ”BHINNEKA TUNGGAL IKA” *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JP/article/viewFile/1726/1512>.
- James Banks, *Transforming the Multicultural Education of Teachers: Theory, Research and Practice*, ed. M. Vavrus (New York, NY: Teachers College Press, 2002).
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2016). Denominasi Gereja Harus Jadi Pemersatu. <https://kemenag.go.id/nasional/denominasi-gereja-harus-jadi-pemersatu-tggtk1>.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2006. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Maria Ulfa. (2013). “Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid,” *Kalimah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 11, no. 2: 238. DOI:[10.21111/klm.v11i2.94](https://doi.org/10.21111/klm.v11i2.94).
- Nelson Hasibuan. 2023. “Guru PAK Sebagai Pengembang Kurikulum”. *MAWAR SARON: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Gereja 2* (1):15-43. <https://ojs.sttmsl.ac.id/index.php/Jurung/article/view/27>.
- Pira, dkk. (2022). Inovasi Metode Pembelajaran Alkitabdi Ibadah Sekolah Minggu di Tengah Tantangan Revolusi. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR), Vol.1, No.3*. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjmr/article/view/782/578>.
- Sadrakh Sugiono, “Kualitas Guru Pendidikan Agama Kristen (PAK),” in *Reaffirming Our Identity: Isu-Isu Terpilih Menjawab Perubahan Sekaligus Mempertahankan Identitas*, ed. Junifrius Gultom and Frans Pantan (Jakarta: Bethel Press, 2014), 167–86.

- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Ketahanan Nasional melalui Geopolitik dan Geostrategi. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02 (01), 184–196. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/145>.
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023a). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02 (01), 224–240. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/142>.
- Sukirno Sukirno and Nur Adhim, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): 11, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.11-24>.
- Sutarto Agus. (2021). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Pengikat Persatuan Bangsa. <https://mediacenter.slemankab.go.id/2021/03/24/bhinneka-tunggal-ika-sebagai-pengikat-persatuan-bangsa/>.